

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam setiap perekonomian pemerintah perlu melakukan berbagai jenis pembelanjaan. Pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki struktur, menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan dan membiayai anggota polisi dan tentara untuk menjaga keamanan merupakan pengeluaran yang tidak terelakan pemerintah (Berutu, 2009). Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewajiban mutlak dalam mengumpulkan sumber-sumber dana (penerimaan) untuk membiayai seluruh pengeluaran yaitu pengeluaran rutin (belanja rutin) dan pengeluaran pembangunan.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa lepas dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Otonomi daerah adalah hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah (Pramela, 2009).

Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Soekarwo, 2003:93). Dalam pelaksanaan

otonomi tersebut pemerintah daerah harus memiliki wewenang dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, serta didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan persyaratan dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam konteks desentralisasi, daerah provinsi memiliki wewenang sebagaimana pemerintah pusat. Wewenang tersebut antara lain adalah melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota dan keputusan kepala daerah. Reformasi anggaran dalam konteks otonomi memberikan paradigma baru terhadap anggaran daerah yaitu bahwa anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan umum, yang dikelola dengan berdaya guna dan berhasil guna serta mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan penuh bagi tiap-tiap daerah baik provinsi, Kabupaten / kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Kebijakan tersebut dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, meminimalisasi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kuantitas pelayanan publik (Wertianti, 2013). Perkembangan pelaksanaan otonomi atau desentralisasi memberikan kesempatan bagi kabupaten untuk memperluas potensi (Wertianti, 2013).

Dengan dikelonanya APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintah pusat dalam rangka perwujudan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal, pemerintah daerah lebih leluasa untuk meningkatkan pertumbuhan daerah untuk mensejahterakan masyarakat di daerahnya.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang
Tahun 2010-2014

TAHUN	PAD (Rp)	Peningkatan PAD
2010	41.616.836.469,00	
2011	53.000.000.000,00	11.383.163.531,00
2012	61.379.555.364,00	8.379.555.364,00
2013	78.104.204.057,00	16.724.648.693,00
2014	86.529.909.027,00	8.425.704.970,00

Sumber: Website Resmi Pemerintah Kota Kupang

Data Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Dari tahun 2010-2014, peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar Rp 16.724.648.693,00 dan kenaikan terkecil terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar Rp 8.379.555.364,00. Dari tabel diatas setidaknya dilihat bahwa kemampuan pemerintah daerah kota Kupang dalam mengelola keuangan daerah cukup baik mengingat besarnya PAD setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang biasa disingkat dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus

dicatat dan dikelola dalam APBD penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak di catat dalam APBD.

Belanja daerah menurut UU No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, "belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih". Menurut Halim dalam Wijayanti (2015), "belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran".

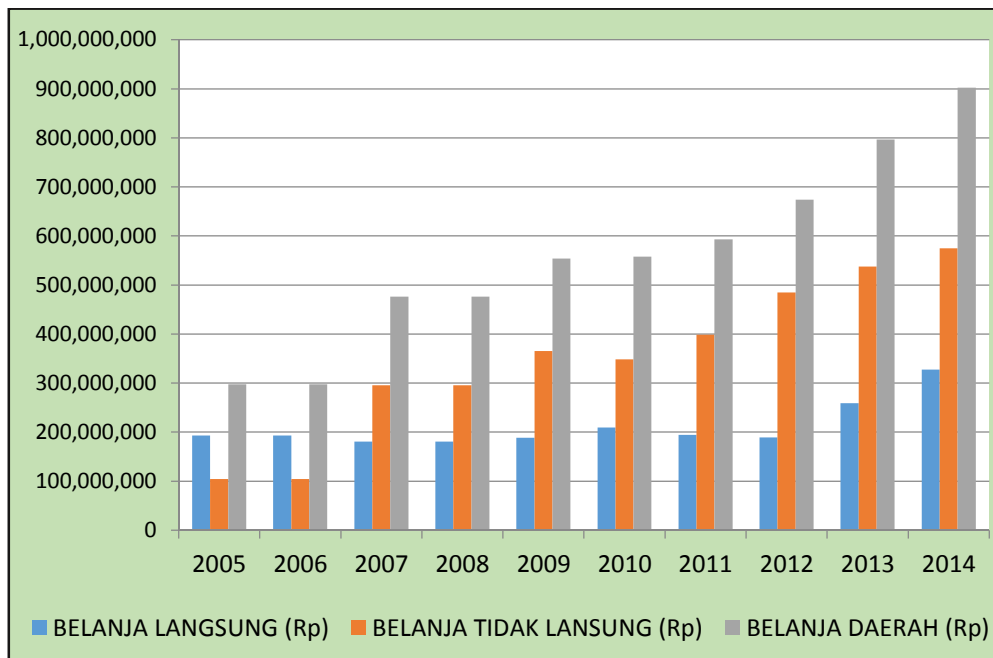
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dijabarkan dalam Pemendagri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 1.2
Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2005-2014

TAHUN	BELANJA LANGSUNG (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA DAERAH (Rp)
2005	193.301.760	104.330.274	297.632.034
2006	193.301.760	104.330.274	297.632.034
2007	180.432.881	295.634.160	476.067.041
2008	180.432.881	295.634.160	476.067.041
2009	188.340.295	365.288.193	553.628.488
2010	209.444.987	348.169.003	557.613.990
2011	194.084.225	398.815.346	592.899.571
2012	189.399.176	484.778.576	674.177.752
2013	258.899.845	537.572.682	796.472.527
2014	327.776.922	574.625.071	902.401.993

Sumber: Bagian Keuangan Kota Kupang, 2015

Grafik 1.1
Belanja Daerah Kota Kupang tahun 2005-2014



Sumber: Bagian Keuangan Kota Kupang, 2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum total Belanja Daerah di kota Kupang dari tahun 2005-2014 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Total belanja Daerah terbesar terjadi pada Tahun 2014 yakni sebesar Rp 902.401.993 dan total belanja terkecil terjadi pada Tahun 2005 dan 2006 yakni sebesar Rp 297.632.034. Pada Tahun 2006 Jumlah total belanja daerah tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2008 juga total belanja daerah tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Total Pendapatan Asli daerah yang diterima suatu daerah dalam masa otonomi daerah adalah cerminan dari bagaimana kemampuan pemerintah suatu daerah dalam proses pembangunan perekonomian daerahnya. Apabila distribusi belanja suatu daerah dalam proses pembangunan untuk menyiapkan sarana dan prasarana, menyiapkan infrastruktur pendukung perekonomian, menyiapkan lapangan kerja dan menyiapkan masyarakat berSDM berlangsung dengan baik, maka efek langsung yang akan diterima adalah meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat dan meningkatnya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi Total pendapatan asli daerah yang diterima.

Tabel 1.3
Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang
Tahun 2010-2014

Tahun	PAD	Belanja Daerah	% Sumbangan PAD terhadap Belanja Daerah
2010	41.616.836.469,00	557.613.990.000	7,46 %
2011	53.000.000.000,00	592.899.571.000	8,93 %
2012	61.379.555.364,00	674.177.752.000	9,10 %
2013	78.104.204.057,00	796.472.527.000	9,80%
2014	86.529.909.027,00	902.401.993.000	9,58%

Sumber : Bagian keuangan Kota Kupang dan Website Resmi Kota Kupang, 2015.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa presentas sumbangan PAD terhadap keseluruhan belanja daerah pemerintah kota kupang masih sangat rendah terlihat dari rata-rata presentase sumbangan PAD yang masih berada dibawah angka 10%. Total sumbangan terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 9,80% dan total sumbangan terkecil terjadi pada tahun 2010 yaitu 7,46%. Dari data diatas diduga bahwa distribusi belanja daerah dalam 5 tahun terakhir ini belum sepenuhnya berfokus pada belanja pembangunan, sehingga menyebabkan total PAD yang diperoleh pun belum terlalu maksimal. Pencapaian PAD yang belum maksimal ini menandakan bahwa perekonomian di Kota kupang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Keadaan perekonomian yang belum berjalan dengan baik ini akan sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah.

Salah satu indikator yang sangat penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mengandung makna yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses

yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil berkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh sistem kelembagaan. Adapun pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. (Mone, 2013).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mendorong barang dan jasa yang diproduksi ke masyarakat bertambah (Wertianti, 2013). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahu. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah diproduksi dengan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar konstan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar untuk mengeliminasi faktor-faktor kenaikan harga.

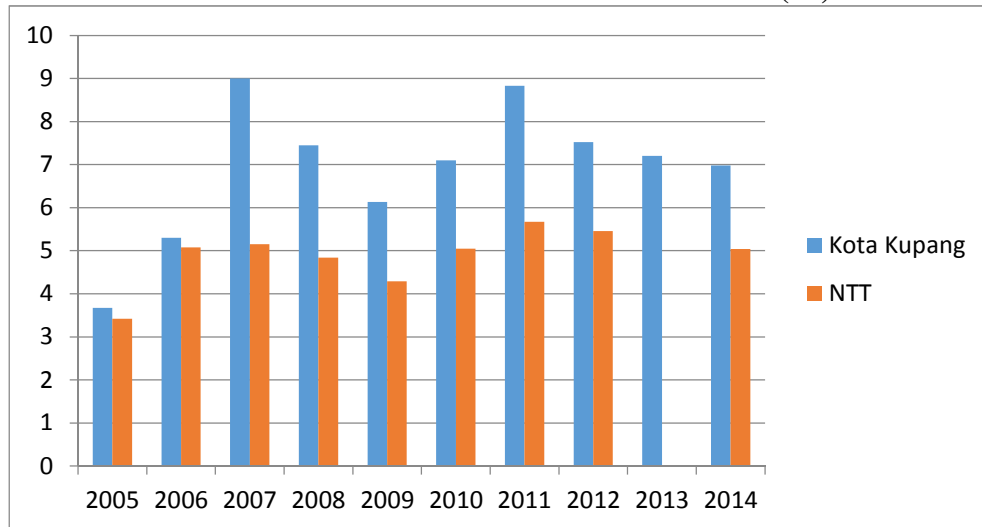
Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang Tahun Dasar 2000 dan
Tahun Dasar 2010 Periode 2005 - 2014

Tahun	Kota Kupang (%)	NTT (%)
2005	3,67	3,42
2006	5,30	5,08
2007	9,00	5,15
2008	7,45	4,84
2009	6,13	4,29
2010	7,10	5,05
2011	8,83	5,67
2012	7,52	5,46
2013	7,20	5,42
2014	6,98	5,04

Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2015

Dapat dilihat dari tabel diatas menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang dan di Provinsi NTT cenderung mengalami fluktuatif di setiap tahunnya, misalnya pada tahun 2005 untuk laju pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang berjumlah 3,67%, di tahun 2006 meningkat menjadi 5,30%, di tahun 2007 terus meningkat menjadi 9,00%, pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 7,45%, pada tahun 2009 juga mengalami penurunan 6,13%, di tahun 2010 kembali mengalami peningkatan sebesar 7,10%, di tahun 2011 meningkat menjadi 8,83%, di tahun 2012 kembali mengalami penurunan sebesar 7,52%, sedangkan pada tahun 2013 menurun menjadi 7,20%, hingga pada tahun 2014 terus mengalami penurunan sebesar 6,98%.

Grafik 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang Tahun Dasar 2000 dan
Tahun dasar 2010 Periode 2005-2014 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2015

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerahnya lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasinya menekankan aspek pemerataan dana keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modalnya di daerahnya.

Dari permasalahan ketidakmampuan belanja daerah dalam meningkatkan PAD sehingga berdampak bagi pembanguana ekonomi yang belum maksimal di kota

kupang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
**“PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KOTA KUPANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan sebagai berikut :

Apakah ada pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan.
- b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak yang berkepentingan untuk menganalisa masalah-masalah yang berhubungan dengan APBD Kota Kupang